
EKSISTENSI DAYAH DI ACEH MASA KOLONIALISME SAMPAI ORDE BARU (1900-1998)

Basri

Institut Agama Islam Negeri Langsa, Aceh, Indonesia
Email kontributor: basri.ibrahim@iainlangsa.ac.id

Abstrak

Dayah merupakan institusi pendidikan (*tafaqquh fi addin*) keberadaannya telah mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan dalam perkembangannya memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kemajuan pendidikan bangsa serta berperan menjadi lembaga perjuangan dan perpolitikan. Pada awal abad ke-20 perkembangan dayah mendapat pengawasan Pemerintahan Belanda (Ordonansi Guru), sekalipun demikian, dayah tetap eksis dengan berbagai pola, kurikulum dan metode pembelajaran yang dinamis sehingga memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membentuk tradisi keislaman dan keilmuan masyarakat dan melahirkan ulama yang kharismatik, yang tidak hanya berperan sebagai agamawan, jua negerawan dan dalam perubahan politik di Aceh.

Kata Kunci: Dayah, Kesultanan, Kolonialisme, dan Orde Baru

Abstract

Dayah has existed as one of the education centers and contributed to integrating all aspects at a very significant level in Aceh towards education and politics. In earlier the 20 century, the development of Dayah was supervised by the Dutch government. Nevertheless, Dayah still presented its authority through the idea, pattern, curriculum, and method of dynamic learning. As a result, it played a role as a good model to create Islamic tradition, learning community, and charismatic Islamic scholars. In general, they will transform their responsibility not only as a religious scholar but also as a statesman who dedicate themselves to political change in Aceh.

Keywords: Dayah, Sultanate, Colonialisme, and New Era

A. PENDAHULUAN

Sejak berdiri pendidikan Islam sudah memainkan peran penting, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, bahkan menjadi salah satu proses Islamisasi. Berbagai kegiatan didalamnya cenderung mengarah pada proses dakwah. Meskipun demikian, kehadirannya berkontribusi dalam memajukan sistem pendidikan di Indonesia dengan mendorong masyarakat mentransformasikan sistem dakwah yang sederhana menjadi lembaga pendidikan (Prasetyo, Bashori, and Masriani 2020:79). Dengan kata lain, meskipun dilaksanakan dalam masjid, *meunasah* dan rumah-rumah ulama tidak membatasi pendidikan Islam untuk berkontribusi membangun sistem pendidikan yang bersumber pada tatananan agama Islam dan penyelenggaraan pendidikan Islam cukup dinamis pada berbagai lembaga keagamaan dan dapat memberi kesempatan kepada orang muslim untuk melaksanakan dan untuk memperoleh pendidikan (Ali 1999:211).

Pendidikan Islam di Indonesia telah melewati perjalanan panjang yaitu bersamaan dan sejalan dengan agama Islam masuk ke Indonesia (Daulay 2009:10). Pasca kemerdekaan Indonesia didirikan lembaga Kementrian Agama, sebagai suatu lembaga yang membidangi persoalan agama, termasuk pendidikan agama. Awal pengembangan pendidikan Islam lebih focus pada pendidikan dasar Alquran. Selanjutnya disempurnakan dengan menambahkan unsur-unsur pendidikan lainnya, yang meliputi kurikulum, tujuan pendidikan, sistem pendidikan, media, metode, materi, dan unsur-unsur pendidikan lainnya. Penambahan unsur-unsur tersebut membentuk lembaga pendidikan baru yang modern (Saridjo 1979:9).

Dalam konteks Aceh, dayah merupakan salah satu bentuk kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan agama tujuannya untuk menciptakan lulusan menjadi ulama (Hanafiah 2018). Kehadiran dayah sebagai lembaga pendidikan di Aceh berhubungan erat dengan keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki ulama pada masa kesultanan Aceh (Mortono 1985:98). Penyelenggaraan pendidikan dayah di Aceh merupakan format sistem pendidikan yang mengikuti kultur kehidupan masyarakat serta bentuk integral yang terpadu dan memiliki hakikat tersendiri dengan model-model yang diperkenalkan sejak kedatangan Islam ke Nusantara. Bagi masyarakat Aceh, dayah adalah lembaga pendidikan yang monumental yang telah berkiprah dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Pada periode awal penyelenggaraan pendidikan dayah dilaksanakan secara informal yang lebih memuntingkan pengenalan nilai-nilai agama (Daulay 2004:4) dan pelaksanaannya dilakukan dengan sistem yang sederhana, yaitu menggunakan metode halaqah serta dimulai dari rumah-rumah ulama (*teungku*) kemudiann berlanjut pada tingkat masjid dengan pengajarnya seorang *Teungku Khatib Masjid*. Dalam periode selanjutnya, lembaga pendidikan dayah terus berkembang dengan sistem yang semakin formal.

Perkembangan dan pertumbuhan Dayah di Aceh mengalami dinamika yang menarik dan urgen untuk dikaji, terutama masa akhir kesultanan Aceh hingga menjelang dan awal kemerdekaan yang merupakan bentuk refleksi dari perjalanan sejarah Aceh yang mengalami perubahan drastis. Perubahan struktur sosial politik di Aceh membentuk Aceh untuk merespon perubahan tersebut, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi berbagai kondisional yang akan dihadapi. Diantaranya pergelokan sejarah melawan penjajah Belanda (1873). Perubahan yang terjadi system system politik yang menaungi wilayah, dari merdeka dan berdaulat menjadi terjajah (Usman, AR, and Marzuki 2016:209), dari

kepemilikan modal hingga memberontak (DT-TII), sampai akhirnya menjadi salah satu bagi dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan tersebut tulisan ini akan menguraikan Dinamika Perkembangan Dayah di Aceh abad ke 20.

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini fokus pada eksistensi dayah pada masa kolonial sampai Orde Baru. Dengan demikian, data-data yang dibutuhkan dalam kajian ini secara umum adalah data sejarah masa kolonial dan orde baru. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini menggunakan metode sejarah (*historical research*). Fred N. Kerlinger mengklasifikasikan metode sejarah dalam bentuk *sinkronis* dan *diakronis* (Kuntowijoyo 2003:33). Dua istilah yang dijadikan landasan dalam mengkaji data-data sejarah, termasuk penyelenggaraan dayah masa kolonial hingga Orde Baru. Muhajir menyebutkan sinkronis dalam bentuk peristiwa dibatasi dalam waktu tertentu (Muhajir 2006:43). Berbeda dengan *diakronis*, dimana data-data sejarah dilihat bukan menjadi bagian tersendiri, melainkan keterkaitan dengan masa sebelum dan sesudahnya, serta peristiwa yang melingkupinya (Kuntowijoyo 2003:44). Pengimplementasiandata sejarah dalam kajian ini dilakukan dalam lima tahapan, yakni: memilih topik, kemudian mengumpulkan sumber data. Setelahh sumber daya terpenuhi, dilakukan verifikasi untuk mengetahui kevaliditas data yang dilakukan dengan kritik sejarah maupun keabsahan sumber. Setelah itu, dilakukan interpretasi data. Pada tahap terakhir dilakukan penulisan (Kuntowijoyo 2003:29).

Untuk pengumpulan data tidak hanya pada kajian literasi, tetapi melakukan metode pengumpulan data dalam bentuk wawancara. Tujuannya untuk mendapatkan informasi akuran dari informan (Mulyana 2003:108). Wawancara dilakukan pada tokoh-tokoh yang ikut atau berperan dalam penyelenggaraan pendidikan dayah pada masa kolonial hingga Orde Baru. Selain wawancara, kajian ini juga dilakukan dengan mengandalkan data dokumentasi yang dapat memberika informasi-informasi terkait penyelenggaran dayah (Zuriah 2009:53). Data-data yang terkumpul dengan wawancara maupun dokumentasi, kemudian dianalisis dengan pola identifikasi data yang berkaitan erat dengan penelitian, kemudian melihat pola-pola terkait penyelenggaraan pendidikan dayah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Cikal Bakal Lahir Dayah

Kemunculan lembaga pendidikan dayah bersamaan dengan masuknya Islam ke Aceh dan mengalami masa perkembangan serta pengelolaan yang cenderung formal dan berjenjang terlihat pada masa Kerajaan Islam. Pada masa tersebut sistem pendidikan dimulai pada tingkat dasar yang dilaksanakan pada *meunasah-meunasah* di setiap gampong. Untuk pelaksanaan sekolah lanjutan pertama diselenggarakan di masjid-masjid setiap *muekim*, kemudian siswa dapat melanjutkan pendidikannya pada *Dayah-dayah* sebagai lanjutan untuk pendidikan tinggi yang didirikan oleh ulama yang sudah tinggi pengetahuannya (Duhri 2014:27). Meskipun tergolong sederhana, kegiatan pendidikan tetap berlangsung dengan berbagai kajian ilmu keislaman. Pendidikan Agama Islam di Aceh, dimulai berbentuk pengajian-pengajian di masjid yang oleh para ulama (Raharjo 2002:45). Pelaksanaan pendidikan di masjid-masjid merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan pada tingkat rendah dan menengah.

Di penghujung abad III H. (abad ke-10 M.), jenjang pendidikan dayah terjadi perubahan, mulai dari tingkat rendah sampai pendidikan tinggi. Pendidikan sama sama dengan masa sebelum yang dilaksanakan di *meunasah-meunasah*, kemudian berlanjut pada tingkat menengah, yaitu masjid. Untuk tingkat pendidikan sudah dilaksanakan dalam sistem kelembagaan dengan kepemimpinan *Teungku Chik*. Diantaranya pendidikan tinggi yang terdapat di Cot Kala, yaitu suatu tempat di kecamatan Bayeun (sekarang) Kabupaten Aceh Timur. Lembaga pendidikan tinggi ini selanjutnya dinamakan dengan Dayah Cot Kala yang dipimpin oleh Teungku Chik Cot Kala Muhammad Amin. Lembaga pendidikan tinggi Cot Kala terus berkembang dan menjadi lembaga pendidikan Tinggi tertua di Asia Tenggara ketika itu.

Meskipun Dayah Cot Kala berkembang pesat dengan sistem pembelajaran modern, namun fungsinya tetap pada dakwah dan pengembangan Islam yang mencakup pembinaan pengamalan nilai agama bagi pemeluk-pemeluk Islam sekitar dayah. Karena itu dayah ini lebih menitik beratkan pada kajian-kajian praktis keagamaan, terutama tauhid, fiqh dan tasawuf (Dhuhri 2014:23–24). Berdasarkan hal tersebut Makdisi, sebagaimana dikutip oleh Safwan Idris mendefinisikan dayah sebagai bentuk kata “*zawiyah*” berarti “sudut” atau “pojok”. Dalam kapasitas sebagai lembaga pendidikan, penyelenggaraan pendidikan di dayah awalnya dalam bentuk pengajian yang diadakan di sudut masjid, kemudian berkembang secara dan menjadi lembaga pendidikan yang sangat awal dalam Islam. Dari kondisi inilah kemudian lahir *zawiyah* (Idris 2002:61).

Dalam sejarah pendidikan di Aceh, dayah dikenal juga dengan nama *Meunasah*. Para ahli menyebutkan istilah *meunasah* merupakan bentuk kata dari Bahasa Arab yaitu “*madrrasah*” berarti tempat belajar. Dalam perkembangan kemudian, term dayah menjadi lebih luas yang meliputi semua lembaga tradisional di Aceh termasuk *meunasah*. Istilah lain yang terdapat dalam khazanah pendidikan tradisional yang disebut dengan *Dayah* adalah *Rangkang*, *Dayah Teungku Chik*, *Balai Setia* bahkan *Jami'ah* (Hasjmy 1993:93).

Terlepas dari persoalan tersebut, pada era kesultanan di Aceh, dayah berkembang pesat, yang ditandai dengan jumlah dayah terus bertambah dan didukung oleh jumlah ulama yang mengajar terus meningkat secara kualitas maupun kuantitas, tidak hanya dari Aceh, juga didatangkan tenaga pengajar dari luar Aceh. Hal ini didukung oleh kebijakan Sulthan sendiri yang mendatangkan ulama luar Aceh untuk mengajar pada lembaga pendidikan di Aceh sekaligus menjadi konsultan hukum agama kesultanan (Amiruddin 2008:27). Pendidikan dayah berkembang seiring dengan berdiri kerajaan Islam di Aceh. Dayah pada awalnya menjadi wadah untuk pembinaan pendidikan agama yang diselenggarakan secara sederhana. Kemudian berkembang dan mencapai masa kejayaan pada masa *Kerajaan Aceh Darussalam*. Pada masa tersebut, dayah sudah menjadi lembaga pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, mulai tingkat dasar (*meunasah*), menengah (*rangkang*), dan perguruan tinggi. Meskipun proses pendidikan dayah di masa-masa awal tergolong sederhana, tetapi kegiatan pendidikan tetap berlangsung menurut kondisi dalam berbagai kajian keislaman.

2. Perkembangan Dayah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya

Dari penjelasan sebelumnya memperlihatkan bahwa dayah sebagai lembaga pendidikan terus berkembang mencapai puncak kejayaan yang tidak untuk wilayah kesultanan Aceh, tetapi ikut memberi andil terhadap perkembangan ilmu internasional. Perkembangan-

perkembangan yang telah diraih tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya, ada tiga faktor utama perkembangan dayah di Aceh, yaitu: 1) Faktor historis; 2) Faktor agama; dan 3) Faktor politik.

a. Faktor Historis

Secara historis, Aceh telah menunjukkan diri sebagai wilayah yang kompleks *historis*. Menempati sebagai daerah pintu gerbang masuk Islam ke nusantarasampai mencapai kemajuan dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam besarserta letak *geografis_yang* sangat *strategis* sebagai lalu lintas internasional menjadi daerah ini sangat penting untuk terbentuknya jaringan-jaringan *internasional* sejak abad permulaan (Sekitar abad ke-1 M) (Dhuhri 2014:27) menjadi salah faktor terpenting berkembangnya dayah di Aceh. Pertumbuhan kerajaan-kerajaan Aceh diberbagai wilayah, letak geografis dalam lintas perhubungan dan perdagangan internasional yang menghubungkan bagian Barat, Tenggara dan Timur Asia, melalui Selat Malaka berdampak munculnya kota-kota di sepanjang pantai utara Aceh, kemudian berfungsi sebagai pusat kerajaan, kota kabupaten, kota pelabuhan, perdagangan serta tempat kediaman saudagar-saudagar, yang berpengaruh terhadap tumbuhnya intitusi pendidikan.

Di samping itu, secara historis juga memperlihatkan perkembangan dayah di Aceh juga dilandasi oleh minat orang-orang luar Aceh berkunjung, berdagang, maupun menetap. Bagi pendatang dari daerah non-muslim mereka cenderung menetap di Aceh dan kemudian masuk Islam sehingga membutuhkan lembaga-lembaga pendidikan yang memperkenalkan agama pada mereka. Misal, pendatang dari orang-orang agama Hindu, *Keeling, Madras, Malabar, Mantea* dan Batak. Selain itu orang-orang Aceh juga kedatangan dari bangsa Arab, Persia, Turki, untuk berdagang, dan hidup di kalangan masyarakat Aceh dengan ikatan pernikahan antara satu dengan lainnya kemudian mendirikan dayah-dayah untuk mengajarkan agama (Hasjmy 1983:20).

Banyaknya pendatang yang berminat ke Aceh menjadi keuntungan bagi masyarakat Aceh, baik dari segi agama, maupun pergerakan perekonomian masyarakat. Pada waktu itu, sumber penghasilan masyarakat Aceh adalah hasil-hasil perniagaan yang diperdagangkan di pelabuhan Aceh dan wilayahsekitarnya. Kemakmuran Pasai pernah disaksikan oleh Ibnu Batutah dan Marco Polo saat mengunjungi Pasai, menceritakan betapa sibuknya suasana pelabuhan Pasai pada waktu itu, “banyak kapal dagang yang datang dari berbagai negara di dunia berlabuh dan melakukan transaksi perdagangan di Pasai” (Matsyah 2013:111). Sektor perdagangan, Aceh menjadi pusat pergerakan ekonomi kerajaan yang ditandai dengan banyaknya saudagar-saudagar yang berkunjung, bahkan tingkat Asia Tenggara.

Selain itu, tata kelola gampong (kampung) menjadi faktor lain perkembangan dayah di Aceh. Bentuk wilayah dalam susunan struktur pemerintahan Aceh dimulai dari *gampong*. *Gampong* merupakan unit terendah dalam sistem pemerintahan Aceh. Pada setiap *gampong* mempunyai aturan yang mengatar tatacara kehidupan masyarakat dalam bersosial dan agama. Maka tidak heran disetiap *gampong* mempunyai *Meunasah* yang dijadikan untuk tempat beribadah dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, gampong dipimpin oleh Keuchik (Kepala Desa) dan dibantu oleh pejabat gampong yang membidangi bagian unsur kepemimpinan gampong (Soelaiman 2008:69). Kesatuan beberapa wilayah gampong disebut “Mukim”. Beberapa Mukim memiliki wilayah

kekuasaan yang lebih besar adalah yang disebut *nanggroe*. Struktur Pemerintah Aceh adalah pemerintah pusat, yang merupakan ibukota kerajaan berkedudukan di pemerintahan pusat disebut dengan sultan.

Masyarakat Aceh dalam konteks sejarah merupakan sebagai bangsa dari Negara *Kesultanan Aceh*, sifat perilaku bahasa Aceh dan budaya adat-istiadat yang Islami. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Aceh berdasarkan pada upaya implementasi ajaran Islam. Oleh sebab itu, kerajaan Aceh memiliki budaya hukum bersumber dari Alqur'an, al-Hadis, Ijma' ulama dan Qias yang dirumuskan dalam *Qanun al-Asyi*, yang terkenal dengan istilah "*Adat Meukuta Alam*". Dengan demikian adat-istiadat masyarakat Aceh mencerminkan nilai-nilai Islami. Kehidupan seni budaya di Aceh dilandasi oleh dasar-dasar pokok ajaran Islam. Seni yang menonjol adalah *syair-syair* perang (hikayat perang) yang diciptakan untuk menumbuhkan semangat berjuang. Diantaranya yang cukup dikenal dalam masyarakat Aceh khususnya *Hikayat Prang Sabi*, *Hikayat Prang Gompeuni* dan *Syair prang Aceh*. *Hikayat Prang Sabi*. Seni budaya Aceh bersumber kepada nilai-nilai syariat Islam (Ismail 2013:81). Seni tersebut bertujuan sebagai sarana pembinaan potensi dirinya, penghayatan dan proses internalisasi diri dengan nilai-nilai yang menjadi pembentukan kepribadian yang baik di masyarakat, Semua seni budaya Aceh mencerminkan pesan moral dan nilai-nilai ajaran Islam.

b. Faktor Agama

Tradisi pendidikan Islam Indonesia telah terbangun sebagai mata rantai dari Timur Tengah. Hal ini tercermin dari perkembangan intelektual muslim yang terbangun secara sinergis dengan berbagai ulama di Timur Tengah. Dalam perkembangan intelektual yang kuat itu, "interaksi umat Islam dengan Alqur'an menjadi demikian intens. Alqur'an menjadi sumber rujukan dari setiap persoalan, diuraikan maknanya dan ditafsirkan, lalu diimplementasikan ajaran-ajarannya dalam segenap kehidupan masyarakat Islam (Dahlan 2001:xxi). Peran Islam dalam ruang kehidupan beragama masyarakat Indonesia bukan saja sebuah sistem agama, tetapi membentuk tatanan ideologi yang mengakar kuat sehingga dapat menolak sistem tatanan yang dianggap timbang. Termasuk membebaskan diri dari penguasaan kolonialisme. Sejak awal sudah dinampakkan bahwa "Islam mempunyai kekuatan mampu mereformasi ketimpangan-ketimpangan social yang tidak sejalan dengan nilai-nilai universal Islam (Ali and Effendy 1986:32).

Selain karena reformasi Timur tengah, upaya Belanda memperkenalkan sistem pendidikan modern yang diselenggarakan di Barat menjadi faktor lain perubahan sistem pendidikan di dayah. Dengan kata lain, Belanda memberi kontribusi terhadap sistem pendidikan yang berlaku pada dayah, termasuk dalam proses belajar mengajar (Zuhairimi 1997:46). Penjajahan Belanda tidak hanya berpengaruh pada ekonomi dan sosial, bahkan menjadikan pendidikan Islam di Aceh menjadi terbelah, yaitu : *Pertama*, pendidikan yang diperkenalkan oleh sekolah Barat tidak mengajarkan agama bersifat sekuler. *Kedua*, pendidikan yang dilaksanakan pada dayah yang hanya pembelajaran agama saja. Dengan kata lain menurut istilah Wijosukarto, dalam Muhaimin, pada periode tersebut terdapat dua corak pendidikan, yaitu corak lama (konvensional) yang dilaksanakan dan berpusat pada dayah yang menekankan pembelajaran semata-mata pada pengetahuan dan ketrampilan agama dan corak baru dari pengetahuan sekolah-sekolah yang dikelola Belanda yang berpusat pada pengetahuan dan ketrampilan umum (Muhaimin 1999:78). Kemajuan pemikiran di Aceh, dan

merupakan suatu kegiatan pembaharuan di bidang agama. Terdapat sejumlah ulama dan karyanya menjadi bahan studi ilmiah yang tidak habis-habisnya di Aceh. Dengan banyak ulama yang cukup populer pemikirannya, membangun lembaga-lembaga Pendidikan dan mendirikan organisasi keagamaan untuk menghasilkan generasi yang mempunyai jiwa dan semangat untuk memajukan pendidikan di masa depan, maka dapat dipastikan, bahwa faktor agama memberi pengaruh yang sangat terhadap kemajuan pendidikan dayah di Aceh.

c. Faktor Politik

Dilihat dari ranah politik, penyelenggaraan dayah di Aceh berbeda dengan pesantren daerah lain. Karena penguasaan daerah Aceh oleh Belanda terlambat, maka penyebaran pendidikan modern versi Belanda juga terlambat diperkenalkan. Upaya pemerintah Belanda menyelenggarakan pendidikan modern baru terlaksana sekitar abad ke 20, itupun hanya untuk kalangan bangsawan (*uleebalang*). Posisi *uleebalang* ketika itu memihak pada Belanda, bahkan bersama-sama *uleebalang* melawan saudaranya, termasuk perlawanan terhadap Teungku Chik Dirundeng (Syamsuar 2020). Meskipun perang melawan Belanda terus berkejolak, usaha ke arah perdamaian terus dirintis namun usaha tersebut gagal karena Aceh selalu saja melakukan perlawanan. Usaha untuk intensifikasi sistem pendidikan baru dapat dilakukan ketika perlawanan masyarakat Aceh melemah. Beberapa dayah mulai membuka diri dengan perubahan sistem pendidikan, sehingga berdirilah lembaga-lembaga pendidikan madrasah di dayah-dayah modern. Sebagian generasi muda Aceh (lulusan madrasah) menjadi guru di madrasah-madrasah, seperti A. Hasjmy dan Sayid Abubakar mengajar di Perguruan Islam Seulimeum dan M. Nur El Ibrahimy mengajar di Madni. Sebagian lainnya membangun dan mengorganisasi madrasah baru, sehingga jumlah madrasah lebih dari 100 buah di Aceh pada akhir zaman *colonial* (Veer 1985:51). Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia memiliki corak yang cukup *intensif*, yang dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah. Dalam konteks ini, Pemerintah menyikapi dengan berbagai kebijakan yang berimplikasi pada kultural dan politis. Kebijakan-kebijakan dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, sistem beragama masyarakat sebagai konsekuensi dari pengaruh ide-ide pembaharuan Timur Tengah. *Kedua*, fenomena kebijakan pemerintah Belanda dalam bidang pendidikan mendapat respon dari masyarakat. Kebijakan pemerintah diawali dengan pembentukan Kementerian Agama yang memegang kewenangan utama dalam penyelenggaraan bidang agama. Secara struktural kewenangan Kementerian Agama di bidang pendidikan Islam adalah pendidikan Islam di Indonesia berada di bawahstruktur Kementrian Agama. Dengan demikian, pemberdayaan Kementerian Agama perlu dilakukan sebagai langkah untuk kemajuan pendidikan Islam. Sedangkan secara kultural agar umat Islam dari seluruh lapisan masyarakat ikut serta memberdayakan pendidikan Islam (Daulay 2009:11).

Selain itu, faktor politik lain yang berpengaruh terhadap pendidikan dayah di Aceh adalah pergerakan politik pada tanggal 21 September 1953 yang dipimpin oleh *Teungku Muhammad Daud Beureueh*. Pergerakan ini muncul sebagai bentuk kekecawaan masyarakat Aceh terhadap Pemerintah Pusat, karena wilayah Aceh yang disebut sebagai daerah modal ternyata dalam penyelenggaraan pemerintahan harus tunduk ke Sumatera Utara. Kondisi ini kemudian menjadi faktor cikal bakal pembentukan dan berdirinya *Darul Islam* di Aceh. Melalui organisasi tersebut, masyarakat Aceh di bawah kepemimpinan Daud Beureueh merancang sistem pemerintahan Islam dengan misi utama melawan sekularisme. *Darul Islam*

juga dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Aceh kepada Pemerintah Pusat (Firdaus 1999:73), dan dengan sikap politiknya, “mengumumkan bahwa Aceh adalah sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang menjalankan Syariat Islam, yaitu *Negara Islam Indonesia* (NII) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, dengan nama *Darul Islam* (DI) dan pasukan keamanan bernama Tentara Islam Indonesia (TII). Aceh adalah daerah modal dalam meneruskan cita-cita proklamasi kemerdekaan, maka Aceh sebagai basis yang akan dilancarkan perang *gerilya* jangka panjang dengan melibatkan seluruh rakyat (Jakobi 1992:219). Setelah mengalami konflik, pemerintah Indonesia melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia yang dikenal dengan Misi Hardi. Perundingan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya melakukan gencatan senjata kedua pihak, Teungku Daud Beureueh bergabung kembali dalam pangkuan Ibu Pertiwi, Tentara Islam Indonesia (TII) digabungkan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat Darul Islam (DI) kembali diberi pekerjaan sebagaimana semula (26 Mei 1959). Untuk Propinsi Aceh diberi hak Istimewa yang mencakup 3 (tiga) keistimewaan oleh Misi Hardi, yaitu: *Pertama*, keistimewaan di bidang beragama; *Kedua*, keistimewaan di bidang Pendidikan; dan *Ketiga*, keistimewaan di bidang adat-istiadat.

Di sisi lain, dalam negara Republik Indonesia, kebijakan politik umat Islam adalah telah mendirikan Kementerian Agama, yang merupakan koalisi Muslim dan beberapa Partai Nasionalis, antara lain Masyumi, Nahdhatul Ulama, PNI dan PKI. Pembentukan Kementerian Agama menimbulkan kontroversi dari berbagai golongan, baik dari kalangan muslim, non muslim maupun kelompok nasionalis sekuler. Pembentukan Kementerian Agama yang dilakukan oleh pemerintah lebih didasarkan pada pertimbangan politik yang diperlukan dari sebuah sistem tata pemerintahan yang baru (Lapidus 1999:340). Kementerian Agama sebagai harapan umat Islam yang secara intensif dan berkomitmen memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia, baik secara ideologi, politik, kelembagaan maupun sistem pendidikan, sehingga cita-cita umat Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Usaha dalam bidang pendidikan Islam ini sesuai aspirasi dan harapan umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pada pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan Islam dari pendidikan tingkat dasar, sampai pada tingkat pendidikan tinggi Islam.

Memasuki tahun 1966 (Era Orde Baru) Aceh kembali lahir gerakan-gerakan yang menentang pemerintah. Awalnya Hasan Tiro mantan duta Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII) pulang ke Aceh pada awal tahun 1970 melakukan kontak dengan rekan perjuangan seperti Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam lainnya, Pada tanggal 4 Desember 1976 diproklamlirkan Aceh Merdeka (AM). Muhammad Hasan Tiro merintis perjuangan dengan semangat di New York untuk mengagendakan DI/TII ke dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan agar seluruh masyarakat memilikihak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*), akan tetapi upaya tersebut menemukan kegagalan (Al-Chaidar et al. 1998:39). Pergulatan masyarakat Aceh dalam berbagai aspek kehidupan selalu identik dengan pergulatan yang dilakukan kaum cendikia Islam, perubahan dalam rangka membentuksuasana baru untuk mencapai suatu kemajuan bagi Aceh. Berdasarkan kondisi politik tersebut, dalam suasana yang baru lahirnya lembaga-lembaga pendidikan Islam memberi nuansa ilmiah yang menarik untuk dikaji dan *dideskripsikan*

dalam pertemuan ilmiah, tentu hal ini memberi pengaruh untuk transformasi pendidikan Islam, baik dalam bidang kelembagaan maupun sistem pendidikan.

3. Dayah di Aceh Sebelum Abad 20

Semangat fanatisme masyarakat Aceh yang cukup tinggi terhadap Islam, mendorong untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan dayah yang cukup dinamis sebelum abad ke 20, yang dapat dibagi dalam beberapa fase perkembangan, yaitu:

a. Perkembangan dayah abad 17-18 M.

Pada abad 17-18 M Aceh dipimpin oleh Iskandar Muda. Periode tersebut, Kerajaan Aceh mengalami masa keemasan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Pendidikan menjadi perhatian serius Sultan Iskandar Muda, berbagai kebijakan yang sistematis dan menyeluruh mengatur sistem penyelenggaraan pendidikan Islam ketika itu. Agar pendidikan Islam yang dilaksanakan dalam setiap jenjang mencapai tujuan yang sama “membina manusia-manusia yang memiliki kemampuan di bidang pemerintah, social. Maupun agama.

Di samping itu, dilihat dari pelaksanaan pendidikan dan jenjangnya, pemerintah Iskandar Muda telah berhasil mentransfer sistem pendidikan Madrasah Nizamiyah dalam pendidikan di Aceh. Sistem pendidikan Madrasah Nizamiyah menstruktur dalam sistem pendidikan Aceh sehingga terlihat sistematis dan terorganisir. Begitu juga sistem pendidikan di Aceh sudah terlihat kearah tersebut, di mana pendidikan dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir dengan baik dari tingkat yang paling rendah (*meunasah*) sampai ke jenjang pendidikan tinggi yaitu: tingkatan pendidikan dari *Meunasah*, *Rangkang*, *Dayah*, *Dayah Teungku Chik*, dan *Jami'ah Bait ar-Rahman* menjadi satu sinergis sistem pendidikan bertingkat dan dengan *out put* yang selalu bersinambung (Hasjmy 1980:214). Mengenai berapa jumlah pendidikan yang dilaksanakan ketika, penulis belum mendapatkan data, Snouck Hurgronje yang dianggap sebagai peneliti perintis mengenai soal-soal Aceh dalam karya besarnya, *De Atjehers* (2 jilid, 1893/1894) juga tidak menyinggung jumlah lembaga pendidikan Islam yang ada di Aceh pada waktu itu. Dalam bukunya tersebut Snouck hanya menyebutkan nama beberapa *dayah* yang mungkin dianggap penting di sana sambil menguraikan peranan *meunasah* dan juga *dayah* dalam masyarakat Aceh (Rohmana 2016:147).

Setelah Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya Iskandar Tsani (1636-1641), pembinaan pendidikan di Aceh masih melanjutkan sistem yang diterapkan oleh Sultan Iskandar Muda. Di mana peranan yang sama antara ulama dan umara dalam memaksimalkan fungsi lembaga pendidikan Islam untuk peningkatan kualitas pendidikan dan wacana intelektual masyarakat Aceh. Namun banyak kebijakan Sultan terhadap pendidikan tidak terselesaikan karena masa pemerintahannya hanya sekitar 5 (lima) tahun (Muqoyyidin 2016:30). Walaupun demikian lembaga pendidikan di Aceh seperti *meunasah*, *rangkang*, *dayah* dan *al-Jami'ah* pada masa Iskandar Tsani semakin maksimal fungsinya sebagai lembaga pendidikan Islam, terutama berkaitan dengan tujuan pendidikan yaitu Islamisasi kelembagaan dan bebas buta huruf bagi seluruh lapisan masyarakat Aceh.

Sedangkan pada masa Sultanah Sri Ratu Tajul 'Alam Syafiatuddin Johan berdaulat (1641-1675) dalam bidang pendidikan disamping melanjutkan program yang sudah ada tentang sistem pendidikan Islam, juga melakukan pengembangan lembaga pendidikan.

Ahmad mengemukakan bahwa Ratu Syafiatuddin melakukan formalisasi bentuk pemerintahan yang diciptakan oleh ayahnya Iskandar Muda sehingga mencapai bentuk yang paling ideal dan lengkap baik dalam bentuk maupun sistemnya (Iswandi 2019).

Selain itu, Ratu Syafiatuddin juga dikenal dan berjasa dalam memperbaiki dan mempertinggi derajat wanita Aceh di tengah-tengah masyarakat serta membuka kesempatan terhadap wanita untuk mengambil peranan dalam semua kegiatan masyarakat. Ini merupakan hal yang cukup menarik dan mengagumkan, karena pada saat itu belum banyak negara-negara yang memberikan kesempatan kepada wanita terutama dalam militer dan pemerintahan.

Pembangunan dayah semakin berkembang di Aceh ketika itu. Perkembangan tersebut juga dipelopori oleh banyaknya *teungku-teungku* yang telah memperoleh pendidikan baik pada berbagai lembaga pendidikan yang ada, seperti: *DayahManyang (al-Jami'ah)*. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda yang berpusat di *Masjid Bait al-Rahman* dengan guru sebanyak 44 orang ulama yang berasal dari Arab, Turki, Persia, India dan daerah Aceh sendiri. Sistem pendidikan yang diterapkan sudah mengikuti sistem pendidikan modern sebagaimana sistem India. Demikian juga pembangunan rangkang di masa Tajul Alam Syafiatuddin, yang didirikan oleh *Syeikh Abdurrauf as-Singkili* (alumnus Timur Tengah) mengalami kesuksesan dan kesuksesan ini berlanjut sampai abad ke-18. Sukses pendidikan ini dapat terukur dengan lahirnya murid-muridnya yang terkenal, diantaranya adalah *Syeikh Burhanuddin* di Ulakan yang terkenal di Minangkabau.

Dalam hal ini, Hasjmy menjelaskan beberapa bentuk dayah sebagai gambaran dari kemajuan yang dicapai, yaitu: *Dayah Wanita (Dayah UreungInông)*, *Dayah Pertanian*, *Pertukangan*, *Dayah perniagaan* dan sebagainya yang staf pengajarnya adalah para guru besar (*teungku chik*). Perkembangan tersebut telah melahirkan *teungku-teungku* yang berperan dalam mengurus pendidikan lembaga pendidikan dasar di tingkat yaitu meunasah di tingkat *gampông*. Eksistensi dayah setelah Iskandar Muda sangat berarti, karena iklim politik dan sistem pemerintahan sangat mendukung.

Namun kendala yang dihadapi ketika itu adalah mulai terancam kekuatan kolonial Belanda, terutama pada masa Sultanah Taj al-'Alam Safiatuddin. Kerajaan Aceh Darussalam mengalami berbagai pengaruh dan tekanan-tekanan dari VOC yang menimbulkan dampak dalam kehidupan masyarakat berakibat pada kondisi sosial ekonomi dan politik dan budaya masyarakat. Termasuk pengaruhnya terhadap perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dayah dan lembaga-lembaga lainnya. Meskipun dalam ancaman kolonial, periode ini merupakan masa kejayaan bagi pendidikan dayah di Aceh. Kemajuan dayah dengan kemampuan melahirkan output yang mempunyai keahlian dibidang agama dan umum. Salah satu bukti para sulthan dan sultahanah ketika itu mampu menjadi agamawan, sekaligus negarawan (Hasjmy 1977:95). Seperti kemampuan Ratu Safiatuddin dalam menguasai berbagai disiplin keilmuan, baik dari segi bahasa, agama, filsafat, maupun politik. Dalam bidang bahasa, dengan menguasai bahasa Arab, Persia, Spanyol dan Urdu. Dibidang agama menguasai fiqh, dan banyak bidang-bidang keilmuan lainnya yang dikuasai (Hasjmy 1977:95). Realitas ini, di samping menunjukkan Ratu Safiatuddin sebagai negarawan dan ilmuwan, juga membuktikan bahwa pendidikan yang dilakukan di dayah ketika itu, tidak hanya mampu mendidik santri menjadi agamawan, tetapi juga menjadi berbagai disiplin keilmuan lainnya.

Di samping itu, kemajuan dayah pada masa tersebut juga terlihat dari banyaknya dayah-dayah yang bermunculan hingga akhir abad 18 awal abad 19. Padahal akhir abad 18 merupakan masa kemunduran kerajaan Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa kemunduran kerajaan tidak berpengaruh terhadap perkembangan dayah. Menurut analisis penulis, ada dua faktor yang menyebabkan diakhir masa kerajaan Aceh berkembang pesat, yaitu: *Pertama*, sikap para sulthan dan sultahanah Aceh yang sangat serius terhadap perkembangan pendidikan. hal ini dibuktikan dengan kesediaan kerajaan membiayai lembaga pendidikan yang diselenggarakan ketika itu, bahkan kerajaan membiayai berbagai hasil karya ulama ketika itu. Misal, masa Pemerintahan Ratu Safiatuddin, adalah masa yang paling berkembang ilmu pengetahuan, dalam masa itu, banyak kitab-kitab berbagai cabang ilmu pengetahuan dikarang, baik atas permintaan Ratu Safiatuddin atau atas kehendak para Ulama itu sendiri. Diantara kitab yang dibiayainya adalah tafsir al-Mustafid karya Abdul Rauf Al-Sinkili. *Kedua*, kebijakan sulthanah terhadap kelompok oposisi yang menolak kepemimpinan perempuan. Sekitar tigaratus orang Ulama pada ini tidak menyetujui politik Ratu Safiatuddin dalam menjalankan pemerintahan, diberikan kemerdekaan kepada mereka untuk mengembangkan diri ke seluruh wilayah Kerajaan dengan tujuan dapat mencirikan lembaga-lembaga pendidikan, seperti, Syekh Abdul Wahab yang hijrah ke Tiro dan mendirikan Pusat Pendidikan Islam di sana, sehingga ia kemudian menjadi salah satu pusat pendidikan yang terkenal dalam Kerajaan Aceh Darussalam. Syekh Abdul Wahab ini adalah datunya dari Ulama-Ulama Tiro yang terkenal.

b. Perkembangan Dayah Abad 19 M.

Sebagaimana pada masa sebelumnya, akhir abad 18 dan awal abad 19 merupakan masa perkembangan dayah di Aceh. Pada awal abad 19 sejumlah dayah telah berdiri memperkaya lembaga pendidikan Islam di Aceh. Diantara dayah-dayah tersebut adalah : Dayah Tgk. Chiek Tanoh Abee, Dayah Tgk. Chiek Kuta Karang (Dayah Ulee Susu), Dayah Lam Birah, Dayah Lam Nyong, Dayah Lam Bhuk, Dayah Krueng Kalee, Dayak Lam Krak, Dayah Lam Pucok dan Dayah Lam U di Aceh Besar; Dayah Rumpet di Kuala Daya, pantai barat; Dayah Tgk. Chiek Ditiro, Dayah Tgk. Chiek Tante Geulima. Di Aceh Pidie, Dayah Meunasah Blang (Samalanga) dan dan sejumlah Dayah yang berkembang di sekitar Batee Iliek sebagai Kuta Pertahanan, seperti Dayah Cot Meurak, Dayah Pulo Baroh dan lain-lain (Aceh Utara, yang cukup eksis terhadap pendidikan. (Pendidikan dan Kebudayaan, 1984: 20). Kejayaan dan perkembangan dayah pada abad ini tentu tidak terlepas dari kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh ketika itu. Terkait dengan kondisi rakyat Aceh sejahtera, Said mendeskripsikan bahwa masyarakat Aceh sama sekali tidak menunjukkan kemelaratan dari sektor ekonomi. Jalan-jalan terpeliharaan, rumah-rumah dan pekarangan yang dipagari dirawat, rakyat berpakaian baik, dibelakang rumah tampak padang rumput untuk tempat peternakan kambing yang banyak dipelihara, dan sutera yang diproduksi tidak hanya untuk digunakan sendiri, tetapi dapat salah satu komoditi ekspor (Said 1981:755).

Gambaran kejayaan tersebut tidak bertahan lama, setelah Belanda melalui komisaris Wakil Ketua Dewan Hindia Nieuwenhuzen telah mengumumkan pertanyaan perang pada tanggal 1 April 1873 kondisi Aceh berubah menimbulkan gejolak dan konflik dalam masyarakat Aceh. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan social-ekonomi masyarakat, tetapi juga ikut mempengaruhi penyelenggaraan dayah di Aceh. Pada masa ini

fungsi dayah mengalihkan ke fungsi politik dan aktivitasnya perjuangan fisik melawan Belanda. Para ulama pimpinan dayah-dayah ketika itu menjadikan “jihad fi sabilillah” sebagai bagian penting harus selalu dibahas dalam kajian di dayah. Alhasil, proses pembelajaran tidak fokus seperti sebelumnya, tetapi banyak waktu dihabiskan untuk melawan perjuangan melawan kolonialisme.

Dari gambaran di atas menunjukkan ada perubahan terhadap peran dayah institusi lembaga pendidikan menjadi lembaga pengarah pejuang. Dengan kata lain, pada masa tersebut, dayah memegang peranan yang cukup strategis, karena di samping fungsi sebagai lembaga pendidikan, juga menjadi lembaga pengarah tenaga pejuang (murid) ke medan pertempuran dan mempersatukan umat untuk menumbuhkan semangat perjuangan dari cengkraman kolonialis. Pembentukan santri sebagai pejuang dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yang lebih dikenal adalah pembacaan Hikayat Perang Sabi. Hikayat ini menjadi sarana yang efektif ketika itu karena dapat membangkitkan semangat juang para santri. Arena yang sering dijadikan ruang oleh para ulama untuk membaca hikayat ini adalah dayah, rangkang, meunasah dan mesjid; dan bahkan ada dayah seperti dayah di sekitar Batee Iliék—yang langsung menjadi kuta pertahanan. Karena itu tidak mengherankan apabila selama akhir abad ke-19 terdapat sejumlah dayah yang tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, hanya dijadikan sebagai wadah yang berperan dan mendukung untuk memberikan semangat perjuangan, karena dianggap sebagai basis konsentrasi kekuatan perjuangan melawan kolonialisme (Ahmad and Kutoyo 1984:20).

Setelah mengalami kemunduran kondisi dayah, pada tahun 1940 berdirilah dayah labuhan haji yang dipimpin oleh syekh mudawali al-khalidi, yang menunjukkan kembali perkembangan dayah hingga saat ini (Arfiansyah and Riza 2016). Perubahan yang utama yang dilakukan oleh pimpinan dayah Darussalam tersebut dalam pendidikan dayah, yaitu: *Pertama*, menambahkan beberapa pelajaran dalam kurikulum yang telah di hilangkan oleh belanda, Hal ini sebagaimana penjelasan Saifuddin Duhri, bahwa: pendidikan dan pengajaran dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan agama adalah sama, dengan lembaga-lembaga pendidikan agama yang disebut pesantren yang terdapat dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia (Saiful 2018). Hanya Aceh yang membawa kemajuan pendidikan agama melalui lembaga pertama kali di Indonesia. Pada mulanya pendidikan dayah hanya terbatas pada kitab-kitab mengenai ilmu Tauhid, ilmu Fiqh, ilmu tafsir, nahwu dan sharf, tetapi akan tetapi kemudian telah membawa kedalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu balaghah, ma’ani, bayan, badi’, ilmu ushul fiqh dari berbagai kitab Islam, khususnya ushul fiqh Syafi’i. demikian juga dengan ilmu musthalah hadis, ilmu Qur’an, ilmu mantiq, ilmu ‘aruth, ilmu tasawuf, mulai kitab tingkat tinggi (Duhri 2014:37). *Kedua*, sistem yang diberlakukan dalam proses pembelajaran berbeda dengan masa sebelumnya. Sistem yang ditawarkan di dayah ini, proses belajar yang tidak lagi mengandalkan sistem tradisional. Dalam hal ini, Tgk. Muda Wali membagi kelompok belajar dalam tiga, yaitu: kelompok muftadi’in, yaitu kelompok pemula dalam belajar di pesantren, kelompok tsanawiyah dan kelompok Bustanul Muhaqiqin. Dengan demikian telah melaksanakan pendidikan dalam sistem *modern* yang dapat mengikuti perkembangan dunia pendidikan.

4. Kontribusi Dayah Terhadap Masyarakat

Pendidikan Islam merupakan tuntutan kebutuhan bagi kehidupan umat untuk dilaksanakan secara baik dan dikembangkan secara kontinue oleh umat Islam dari masa-kemasa. Pendidikan Islam yang tersebar di berbagai daerah serta memberi membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menata dan mengelola sesuai dengan sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia. Dalam konstek ini, pendidikan Islam di Indonesia selalu menjadi kajian pengembangan ilmu pengetahuan untuk membentuk kualitas hidup umat Islam, sekaligus sebagai bahagian dari sistem pendidikan Nasional. Dalam hal ini, pendidikan Islam menjadi sub sistem dari sistem pendidikan Nasional. Disamping itu dihadapkan pada tuntutan akan proses pendidikan yang efektif, sehingga membentuk kualitas umat Islam yang memiliki daya saing di tengah-tengah kehidupan umat beragama.

Pendidikan Islam secara normatif pada dasarnya bersumber pada Alquran dan Hadis serta kitab-kitab yang menjabarkan isi kandungan Alquran dan hadis. Konsisten dengan prinsip ini, pendidikan Islam memiliki kualitas dan akan mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini. Prinsip universal itu merupakan sebuah konsep yang mampu merespon dinamika perkembangan ilmu pengetahuan untuk disatu sisi mempertahankan semangat keislaman di sisi lain dan mempertahankan aspek teknisnya dengan perkembangan zaman, sebagaimana dapat dilihat sejarahnya, pendidikan Islam telah menunjukkan eksistensi dalam dunia pendidikan dari waktu ke waktu dengan perkembangan yang cukup berarti untuk melahirkan sebuah ketrampilan dengan mencerminkan nilai dan semangat keislaman yang permanen.

Dalam masa yang cukup panjang, pendidikan Islam berada dipersimpangan jalan antara mempertahankan sistem tradisional dan mengadopsi perkembangan dengan sistem modern. Upaya mempertahankan sepenuhnya tradisi lama memberi makna bahwa pendidikan Islam hanya sebuah konsep yang statis, menjadikan ketinggalan sekalipun secara emosional dan *romantisme* dengan identitas pendidikan Islam erat sekali dengan nilai-nilai sejarah. Sementara itu, mengikuti dan mengadopsi dengan berbagai perkembangan modern, berarti pendidikan Islam cukup dinamis, sekalipun tetap mencerminkan akar sejati dan nilai autentik dari sejarah pendidikan Islam. Pendidikan Islam suatu konsep yang cukup universal dan mampu memenuhi keperluan pragmatisme yang profesional untuk menjawab tantangan sesuai dengan perkembangan alam dan lingkungan sekitarnya. Situasi ini tercermin dalam sebuah sistem pendidikan yang memberi arah dan tujuan modernisasi pendidikan Islam. Sebagai lembaga pendidikan, dayah telah banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat dalam berbagai sisi kehidupan. Kontribusi tersebut dapat terlihat pada taraf kehidupan politik, ekonomi, bahkan jenjang perkembangan sosial masyarakat. Sejak tahun 1966 pendidikan di dayah mengalami kemajuan baik dilihat dari aspek kelembagaan maupun dari sistem pendidikan (Silahuddin 2016). Banyak dayah-dayah yang sebelumnya berhenti, sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1966 terus melaksanakan proses belajar mengajar. Adapun bentuk kemajuan yang dicapai dayah sejak tahun 1966, yaitu pada kurikulum yang dipelajari di dayah. Berbeda dengan masa penjajahan Belanda, penyelenggaraan dayah pasca kemerdekaan sampai tahun 1966 dan seterusnya sudah mengakomodasi berbagai perkembangan dengan menerima mata pelajaran umum sebagai kurikulum yang dipelajari di dayah.

Perkembangan dayah pada suatu masa tidak terlepas kondisi sebelumnya. Dimana dayah-dayah sudah mulai bangkit berkembang dari ketinggalan akibat penjajahan. Bahkan ada beberapa dayah yang mencoba mengembalikan keilmuan-keilmuan yang dipelajari sebelumnya, meskipun tidak semuanya. Bertambahnya dayah sebagai lembaga pendidikan tidak terlepas dari out-put yang dihasilkan oleh beberapa dayah terkemuka di Aceh. Misalnya, dayah Darussalam Labuhan Haji telah melahirkan banyak para ulama dengan kualitas ilmunya dedikasinya menjadi refrensi bagi kehidupan di berbagai daerah Aceh maupun luar Aceh. Ulama tersebut kemudian mendirikan dayah-dayah lain di tempat asalnya. Seperti, Abdullah Hanafie mendirikan dayah Tanoh Mirah di Peusangan, dan banyak ulama-ulama lain yang mendirikan dayah setelah pulang dari belajar di dayah-dayah lainnya.

D. KESIMPULAN

Lembaga pendidikan dayah mengalami kemajuan yang cukup berarti sebagai institusi sosial keagamaan dengan eksistensinya cukup strategis dalam menanamkan nilai-nilai dan melakukan transformasi menuju suatu sistem pendidikan yang modern dan membentuk sikap dan profesional menuju kompetensi masyarakat modern. Dayah memiliki tiga fungsi pokok, yaitu: *Pertama*, Transmisi ilmu pengetahuan Islam. *Kedua*, Pemeliharaan tradisi keislaman. *Ketiga*, Pembinaankualitas keagamaan kader ulama. Dalam kehidupan masyarakat Aceh dayah sebagai lembaga yang memberikan dasar-dasar keagamaan, menanamkan nilai-nilai moral dan ketrampilan agama serta membina masyarakat yang memiliki semangat dan tanggung jawab terhadap agama, bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zakaria, and Sutrisno Kutoyo. 1984. *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Al-Chaidar, Sayed Mudhahar Ahmad, Yarmen Dinamika, and Satrijo Saharso. 1998. *Aceh Bersimbah Darah, Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) Di Aceh 1989-1998*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ali, Fackri, and Bahtiar Effendy. 1986. *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Ali, Hery Noer. 1999. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Amiruddin, Hasbi. 2008. *Menatap Masa Depan Dayah Di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Arfiansyah, Arfiansyah, and Muhammad Riza. 2016. "Dampak Peraturan Gubernur Aceh Nomor 451.2/474/2003 terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Dayah." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15(2):177.
- Dahlan, Muhidin M. 2001. *Sosialisme Religius Suatu Jalan Keempat*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Daulay, Haidar Putra. 2004. *Pendidikan Islam; Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Daulay, Haidar Putra. 2009. *Pemberdayaan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rineka

Cipta.

- Dhuhri, Saifuddin. 2014. *Dayah Menapati Jejak Pendidikan Warisan Endatu Di Aceh*. Banda Aceh: Lhee Sagoe Press.
- Firdaus, A. N. 1999. *Dosa-Dosa Politik, (Orde Lama Yang Tidak Berulang Di Era Reformasi)*. Jawa Timur: Pustaka Alkautsar.
- Hanafiah, Hanafiah. 2018. "Dayah Collectively as a Social Movement." *International Journal of Human Rights in Healthcare* 11(1):56–64.
- Hasjmy, A. 1977. *59 Tahun Aceh Merdeka Di Bawah Kepemimpinan Ratu*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasjmy, A. 1980. "Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu Dan Kebudayaan." in *Ismail Suny,(ed.), Bunga Rampai Tentang Aceh*. Jakarta: Bhratara Aksara.
- Hasjmy, A. 1983. *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*. Jakarta: Beuna.
- Hasjmy, A. 1993. *Sejarah Masuk Dan Berkembangnya Agama Islam Di Nusantara*. Jakarta: Al-Ma'arif.
- Idris, Safwan. 2002. "Pengembangan Pendidikan Pesantren/Dayah (Antara Tradisi Dan Pembaharuan)." in *Pengembangan Pendidikan di Nagroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Ismail, Badruzzaman. 2013. *Seni Budaya Adat Aceh Damam Membangun Kesejahteraan*. Banda Aceh: Boebon Jaya.
- Iswandi. 2019. "Pilar-Pilar Pendidikan Islam Di Kesultanan Aceh." *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education* 3(2):109–21.
- Jakobi, Tgk. A. K. 1992. *Aceh Daerah Modal*. Jakarta: Seulawah RI-001.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lapidus, Ira. 1999. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Matsyah, Ajidar. 2013. *Jatuh Bangun Kerajaan Islam Di Aceh*. Yogyakarta: Kaukabar.
- Mortono. 1985. *Negara Dan Usaha Bina-Negara Di Jawa Masa Lampau : Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhaimin. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam*. Padang: IAIN Press.
- Muhajir, Dudung. 2006. "Pendekatan Sejarah." in *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- Mulyana, Deddy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muqoyyidin, Andik Wahyun. 2016. "Aktualiasasi Pendidikan Islam di Dalam Institusi-Institusi Madrasah Terkemuka Abad Klasik." *Madrasah* 6(1):18.
- Prasetyo, Muhammad Anggung Manumanoso, Bashori Bashori, and Masriani Masriani. 2020. "Model Capacity Building Pada Pesantren Perbatasan Binaan Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh." *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 14(1):71–96.
- Raharjo, M. Dawam. 2002. *Islam Dan Transformasi Budaya*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Rohmana, Jajang A. 2016. "Persahabatan Penjajah Dan Bangsa Jajahan Di Hindia Belanda:

- C. Snouck Hurgronje Dan Haji Hasan Mustapa.” *Afkaruna* 12(1):144–61.
- Said, Muhammad. 1981. *Aceh Sepanjang Abad*. Medan: Waspada.
- Saiful. 2018. “Model Pendidikan Karakter Pada Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan.” *Mudarrisuna; Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 8(1):195–217.
- Saridjo, Marwan. 1979. *Sejarah Pondok Pesantren Di Indonesia*. Jakarta: Dharma Bhakti.
- Silahuddin, Silahuddin. 2016. “Budaya Akademik dalam Sistem Pendidikan Dayah Salafiyah di Aceh.” *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40(2).
- Soelaiman, Darwis A. 2008. *Aceh Bumi Iskandar Muda*. Banda Aceh: Pemerintah NAD.
- Syamsuar, Syamsuar. 2020. “Teungku Chiek Dirundeng’s Struggle in Confronting Dutch Colonial.” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 8(1):143.
- Usman, Nasir, Murniati AR, and Marzuki Marzuki. 2016. “The Influence of Leadership in Improving Personnel Performance at Traditional Islamic Boarding School (Dayah).” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 4(2):205.
- Veer, Paul Van T. 1985. *Perang Aceh, Kisah Kegagalan Snouck Hugronje*. Jakarta: Grafiti Press.
- Zuhairimi. 1997. *Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.